

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu hak dasar individu dan komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan pangangan dan menjaminterciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terpenuhinya kebutuhan pangangan tidak hanya dilihat dari kuantitas pangan yang cukup. Tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keragaman, keamanan, dari pangan itu sendiri. Kondisi rawan pangan terjadi apabila kebutuhan pangangan tidak dapat penuhi. Kondisi rawan pangan menjadikan salah satu darimasing-masing pangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dijelaskan bahwa wama salah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangangan.

Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan setiap individu yang hidup di Indonesia. Selain itu, terwujudnya ketahanan pangan akan menjamintercipta penuhnya kebutuhan pangangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangangan setiap indi-

vidu yang tercermindaritersedianyapangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan panganialah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Kebijakan ini merupakan kebijakan turun dari Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Melalui kebijakan Ketahanan Pangan, pemerintah menegaskan perlunya perubahan seluruh sektor baik pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakansalahsatu kebijakan pelaksana daripada kebijakan Ketahanan Pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salahsatu upaya untuk mencegah terjadinya masalah pangan dengan ncara memantau situasi pangan dan gizi. SKPG merupakan serangkaian proses meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi.

Berdasarkan data BPS tahun 2012, pada tahun 2011 masih terdapat 42,08 juta penduduk atau sekitar 17,41% dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Data BPS tahun 2013 menunjukkan persentase angka rawan pangan pada tahun 2012

mencapai sekitar 19,46% atau 47,64 juta penduduk dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Angkaini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,56 juta penduduk. Berdasarkan data Global Food Security Index 2012, yang dirilis Economic Intelligent Unit, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 (0-100). Posisi Indonesia jauh lebih buruk daripada negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.

Kondisi rawan pangan disebabkan oleh banyak faktor. Rawan pangan kronis disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada waktu yang lama karena keterbatasan ekonomi. Rawan pangan transien disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan, banjir, hama, paceklik, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya. Rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara.

Pemantauan kondisi rawan pangan dan anggizisangat diperlukan untuk melihat tingkat kerawanan pangan dan anggizi.

Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan kerawanan pangan. Salah

satu cara untuk memantau kondisi pangan dan anggizi dapat dilakukan melalui SKPG. SKPG dilaksanakan oleh kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui pokja/tim SKPG yang dibentuk oleh pemerintah di masing-masing tingkatannya. Dari rangkaian proses dalam SKPG dihasilkan Peta Rawan Pangan

yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan berbagai intervensi. Intervensi tersebut berupaya bijakan ataupun program untuk mengatasi masalah krisis pangan atau untuk acuan pengelolaan pangan dan gizidalam jangka panjang.

Peta Rawan Pangan dibuat dengan menganalisis tiga aspek, yakni: aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Aspek ketersediaan pangan mengacu pada jumlah produksi pertanian yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan pangan baik secara bulanan maupun tahunan. Aspek akses pangan mengacu pada jumlah rumah tangga miskin. Aspek pemanfaatan pangan mengacu pada jumlah balita dan gangguan di suatu wilayah. Untuk menvisualisasikan tingkat rawan pangan suatu wilayah digunakan tiga warna yakni: warna hijau untuk wilayah dengan kondisi aman pangan, warna kuning untuk kondisi waspada, dan warna merah untuk kondisi terindikasi rawan pangan. Keefektifan Peta Rawan Pangan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan suatu wilayah akan dipengaruhi oleh efektivitas dari pelaksanaan SKPG.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang rentan terhadap kejadian rawan pangan terutama rawan pangan transien. Hal ini karena Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana mulai banjir, angin kencang dan tanah longsor (www.kr.co.id/bantul-siaga-darurat-bencana, diakses 24 Februari 2014 pukul 09.19 WIB). Peran SKPG sangat penting untuk

memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan kondisi pangan dan gizi, sehingga tindakan penanggulangan rawan pangan dapat tepat sasaran.

BerdasarpadaPetaRawan Pangan KabupatenBantulTahun 2012, dari 75 desayang ada di KabupatenBantulterdapat 10 desadengantingkatesikorawanpangandangizi yang tinggi. KesepuluhdesatersebutyakniDesaBanguntapan, DesaSingosaren, DesaJagalan, DesaBangunjiwo, DesaTirtonirmolo, DesaTamantirto, DesaNgestiharjo, DesaGuwosari, DesaArgosari, danDesaSrihardono. Terjadinyakerawanpanpangandangiziumumnyadisebabkanolehtidakterpenuhinyajumlahhasilproduksipertanianuntukmencukupikebutuhanpangan di wilayahtersebut.

Dalampenelitian yang dilakukanolehDwiHarsonodkk (2013), ditemukanbahwaterdapatdesadengankondisitidakrawanpanganakantetapimemperolehbantuandanauntukketahananpangandalam Program DesaMandiriPangan. DesatersebutyakniDesaBawuranKecamatanPleret.Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, seberapa berpengaruh SKPG terhadap penentuan lokasi program-program pemberdayaan desa-desa yang rawan pangan.

SKPGdilaksanakansebagailangkahantisipasidanpenanggulangankerawana npangan di KabupatenBantul.SKPG harusnyamampumenjadipedoman agarpemerataandanpeningkatketahananpangandapatdilakukan.Berdasarkanpadapaparanpermasalahantersebut,

penelititertarikuntukmelihatlebihjauhbagaimanaefektivitas pelaksanaan SKPG di KabupatenBantul dalam menyediakan informasi kondisi rawan pangan dan gizi.Olehsebabitupenelitimengambiljudul“Efektivitas Pelaksanaan SistemKewaspadaanPangandanGizi(SKPG) di KabupatenBantul”.

B. IdentifikasiMasalah

Dari latarbelakangmasalahdiatasdapatdiidentifikasipersemasalahan-permasalahansebagaiberikut:

1. Masihtingginya persentaseangkarawanpangan di Indonesia. Ini menunjukkan terdapat beberapa rakyat Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.
2. Pentingnya SKPG untuk menyediakan informasi kondisi rawan pangan dan gizi, untuk mengantisipasi rawan pangan.
3. Kabupaten Bantul rentan terhadap kejadian rawan pangan transien, sehingga informasi rawan pangan dan gizi sangat diperlukan untuk tindakan pencegahan.
4. Terdapat 10 desa yang terindikasirawanpangan di KabupatenBantulpadatahun 2012.
5. Adanyadesa di KecamatanPleret yang tidakmengalamirawanpanganmemperoleh program-program ketahananpangan.

C. PembatasanMasalah

Berdasarkanpertimbanganluasnyacakupanmasalahdanketerbatasankemampuanpeneliti, diperlukanpembatasan agar penelitiandapatterfokus.Penelitimenfokuskanpenelitianpadaefektivitas pelaksanaanSistemKewaspadaanPangandanGizi(SKPG) di KabupatenBantul.

D. RumusanMasalah

Berdasarkanbatasanmasalah di atas, makarumusanmasalah yang akanditeliti yakni bagaimanaefektivitaspelaksanaanSistemKewaspadaanPangandanGizi(SKPG) di KabupatenBantul?

E. TujuanPenelitian

Penelitianinibertujuanuntuk mengetahuisecara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mengenai efektivitaspelaksanaanSistemKewaspadaanPangandanGizi(SKPG) di KabupatenBantul.

F. ManfaatPenelitian

1. SecaraTeoritis

Penelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaireferensibagijurusan/fakultas/universitasuntukmelakukanpenelitianlanjutanberkenaan dengan kebijakan publikatau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Hasilpenelitianinijugadiharapkandapatmemberikankontribusiterhadap pengembanganIlmupengetahuankhususnyailmuAdministrasi Negara.

2. SecaraPraktik

a. BagiPeneliti

PenelitianinidigunakansebagaisalahsatupemenuhansyaratuntukmemperolehgelarSarjanaSosial di FakultasIlmuSosialUniversitasNegeri Yogyakarta, sekaligussebagaibentukpengaplikasianberbagaimacamilmu yang

telahdipelajariselamamasaperkuliahann. Melihatberbagaipermashansosialkhususnyadalam hal pencegahan rawan pangandengankacamatailmuadministrasinegaradanmendalaminyadengannmetodologipenelitian yang ada.

b. BagiUniversitas

PenelitianinidapatdigunakansebagaitambahreferensidankepustakaanbagimahasiswaUniversitasNegeri Yogyakartakhususnya yang berkaitandengantopikkebijakan publik atau ketahananpangan.

c. BagiPemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangandan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangandan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul. Sehingga masyarakat dapat berperan serta baik pasif maupun aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.